

MODAL SOSIAL DALAM KEPEMIMPINAN WALIKOTA SURAKARTA GIBRAN RAKABUMING RAKA: STUDI POLITIK DINASTI

Aida Fitris Ahmalia – 14010120130112

Program Studi Ilmu Pemerintahan Departemen Politik Pemerintahan FISIP
Universitas Diponegoro, Semarang – Indonesia

ABSTRAK

Dinasti politik telah mewarnai demokrasi di Indonesia. Dalam Pilkada 2020 lalu, Kota Surakarta muncul tokoh baru yang tampil dalam Pemilihan Walikota Surakarta yakni Gibran Rakabuming Raka yang merupakan Putra Sulung dari Presiden RI Joko Widodo. Proses pencalonan hingga kepemimpinan Gibran sebagai Walikota Surakarta 2020 tidak terlepas dari modal sosial yang dimilikinya melalui relasi kekeluargaannya dengan Jokowi. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha melihat peran modal sosial yang dimiliki Gibran terhadap kepemimpinannya sebagai Walikota Surakarta dan meneliti sumber modal sosial Gibran. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Data diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah modal sosial Gibran berasal dari dinasti politik Jokowi sehingga mampu menaikkan elektabilitasnya sebagai tokoh publik. Bentuk dinasti politik yang Jokowi bangun adalah *octopus dynasty*. Dinasti politik Joko Widodo ini berpengaruh terhadap kepemimpinan Gibran sebagai Walikota Surakarta selama dua tahun kepemimpinan. Jaringan kekeluargaan Jokowi diindikasikan adanya praktik politik gentong babi oleh Jokowi terhadap Kota Surakarta yang mampu meningkatkan elektabilitas Gibran sebagai Walikota Surakarta. Praktik politik distribusi berupa politik gentong babi ini digunakan untuk membingkai citra Gibran sebelum namanya dinaikkan menjadi Calon Wakil Presiden RI pada Pemilu 2024.

Kata Kunci: Dinasti Politik, Modal Sosial, Politik Distribusi

ABSTRACT

Political dynasties have colored democracy in Indonesia. In the 2020 regional elections, the city of Surakarta emerged a new figure who appeared in the Surakarta mayoral election, namely Gibran Rakabuming Raka who is the eldest son of the President of the Republic of Indonesia Joko Widodo. The nomination process and Gibran's leadership as Mayor of Surakarta 2020 cannot be separated from the social capital he has through his family relationship with Jokowi. Therefore, this research seeks to see the role of Gibran's social capital in his leadership as Mayor of Surakarta and examine the sources of Gibran's social capital. The method used is a qualitative method. Data obtained from interviews and documentation. The results of this research are that Gibran's social capital comes from the Jokowi political dynasty so that he is able to increase his electability as a public figure. The form of political dynasty that Jokowi built is the octopus dynasty. Joko Widodo's political dynasty greatly influenced Gibran's leadership as Mayor of Surakarta during his two years of leadership. Jokowi's family network is indicated by Jokowi's practice of pork barrel politics towards the City of Surakarta which was able to increase Gibran's electability as Mayor of Surakarta. This practice of distribution politics in the form of pork barrel politics was used to frame Gibran's image before his name was appointed as a candidate for Vice President of the Republic of Indonesia in the 2024 elections.

Keywords: Political Dynasty, Social Capital, Distribution Politics

Korespondensi Penyusun: aidafitrisahmalia@students.undip.ac.id

Kota Surakarta merupakan salah satu daerah otonom sejak dihapusnya Karesidenan Surakarta pada tanggal 4 Juli 1950. Kota Surakarta saat ini dipimpin oleh Walikota Gibran Rakabuming Raka yang memiliki visi dan misi yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026. Visi Misi Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Sementara Misi Kota Surakarta saat ini antara lain; (1) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh; (2) Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan; (3) Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan budaya dan pariwisata; (4) Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang Pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga; (5) Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif; (6) Memakmurkan dan mensejahterakan bersama warga kota yang adil dan inklusif; (7) Merealisasikan daerah yang kondusif dan rukun antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati (Dinas Komunikasi, 2022).

Visi misi tersebut dapat direalisasikan bergantung pada kapasitas kepemimpinan Gibran sebagai Walikota Surakarta ke-18.

Gibran Rakabuming Raka merupakan Walikota Surakarta yang dilantik pada 21 Februari 2021 sekaligus Putra Sulung dari Joko Widodo, Presiden RI saat ini. Gibran memiliki latar belakang sebagai pengusaha muda sebelum terjun ke dunia politik. Gibran disebut sebagai salah satu pemimpin daerah yang tergolong muda hingga mendapat julukan pemimpin *millennial*. Proses pencalonan Gibran sebagai Walikota Surakarta menjadi sorotan karena menjegal Achmad Purnomo yang pada saat itu merupakan Calon Walikota Surakarta yang diusung oleh DPC PDI-P Kota Solo. Di mana Achmad Purnomo telah melakukan kampanye selama kurang lebih enam bulan kemudian secara tiba-tiba Gibran naik menjadi Calon Walikota Surakarta dari DPC PDI-P Kota Solo atas usulan dari DPD Jawa Tengah melalui utusan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI-P. Peristiwa ini diindikasikan adanya intervensi dari Joko Widodo, Presiden RI saat ini. Dengan demikian dilihat dari proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Walikota Surakarta ini terdapat kuatnya modal sosial yang dimiliki Gibran sebagai Putra Presiden RI yang saat itu sedang menjabat.

Gibran merupakan sosok pengusaha muda dan belum pernah berkiprah dalam dunia politik jika dibandingkan dengan mantan Walikota Surakarta Bapak Rudyatmo yang memang politikus tulen (Siswanto, 2021). Dinilai sebagai sosok yang berlatarbelakang pengusaha, kemudian dari segi usia termasuk dalam kategori generasi milenial, serta memiliki *label* sebagai Putra Presiden RI yang menjabat saat ini yakni Joko Widodo membentuk citra yang berbeda. Dinasti politik Joko Widodo yang dianggap mendongkrak popularitasnya dalam pencalonan Walikota Surakarta serta mendukung kepemimpinannya saat setelah terpilih menjadi Walikota Surakarta, Gibran dianggap memiliki dobrakan dalam memimpin Kota Surakarta. Gibran dalam Pemilihan Walikota Surakarta Tahun 2020 lalu memang dianggap memiliki modal sosial yang besar karena didukung oleh popularitas ayahnya yakni Joko Widodo sebagai Presiden RI. Ditambah lagi Kota Surakarta merupakan kota yang menjadi awal karir Joko Widodo sebagai ayahnya (Hakim, 2021).

Gibran Rakabuming Raka sebagai Walikota Surakarta periode 2020-2025 telah mulai terlihat kinerjanya. Dilihat dari pembangunan fisik pada kepemimpinan Gibran, saat ini terdapat beberapa program pembangunan prioritas di Kota Surakarta.

Pada kepemimpinan Gibran, Kota Surakarta banjir Proyek Strategis Nasional di mana itu semua diketahui didanai dari Pemerintah Pusat. Keberhasilan Gibran dalam menarik investasi dan membanjiri Kota Surakarta dengan proyek pusat tidak lepas dari modal sosialnya sebagai Putra Presiden RI yang sedang menjabat saat ini. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Kota Surakarta mengalami beberapa perubahan dan kemajuan baik dari pembangunan fisik. Pembangunan fisik dapat dilihat dari adanya 10 Program Pembangunan Prioritas Kota Surakarta yang menariknya rata-rata tidak bersumber dari APBD Kota Surakarta, melainkan bersumber dari APBN.

Dalam rangka membangun suatu daerah dan mengupayakan kesejahteraan masyarakatnya, seorang kepala daerah dituntut untuk benar-benar memiliki kapabilitas dan kapasitas kepemimpinan yang mumpuni. Berkaitan dengan hal itu Gibran Rakabuming Raka sebagai Walikota Surakarta dalam upayanya membangun Kota Surakarta diharapkan mampu merealisasikan visi misinya selama periode kepemimpinannya di Kota Surakarta. Kapasitas kepemimpinan merupakan kapabilitas seseorang untuk memimpin, mengelola, dan mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Kapasitas

kepemimpinan dipengaruhi oleh modal-modal dalam diri seorang pemimpin. Teori Pierre Bourdieu tentang sumber modal memahami bahwa sumber modal yang dimiliki seorang pemimpin mampu menjaga kekuasaan aktor. Sumber modal ini berperan penting dalam mengukur kapasitas kepemimpinan kepala daerah. Sumber modal menurut Pierre Bourdieu terklasifikasi menjadi empat unsur yaitu, modal sosial, modal budaya, modal simbolik, dan modal ekonomi. Keempat modal tersebut merupakan unsur yang berpengaruh terhadap kualitas dari kepemimpinan seseorang khususnya kepala daerah.

Ditinjau dari teori modalitas di atas, Gibran Rakabuming sebagai Walikota Surakarta memiliki modal sosial dalam kapasitas kepemimpinannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Gibran merupakan putra sulung dari Presiden RI Joko Widodo saat ini. Ini merupakan prestise yang melekat pada diri Gibran sebagai modal simbolik sekaligus modal sosial. Popularitas sebagai keluarga Presiden RI tidak dapat dipungkiri memberikan label dalam diri Gibran. Kapasitas kepemimpinan seseorang pasti dipengaruhi oleh modalitas yang dimiliki. Berdasarkan keempat modal yang dimiliki oleh seseorang pemimpin pasti terdapat modal yang dominan atau paling menonjol

dalam mempengaruhi kualitas kepemimpinannya (Bourdieu, P, 1995). Berkaitan dengan pendapat Bourdieu tersebut Gibran sebagai Walikota Surakarta nampak memiliki modal sosial yang kuat sebagai kepala daerah sehingga mampu mendorong masifnya pembangunan infrastruktur oleh APBN dengan besar nilai proyek Rp 2 Triliun hanya dalam dua tahun kepemimpinannya sebagai Walikota Surakarta.

Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana peran modal sosial dalam diri Gibran terhadap perkembangan Kota Surakarta dan apakah sumber modal sosial tersebut hanya berasal dari dinasti politik Joko Widodo. Kebaharuan dari penelitian ini adalah mengkaji kapasitas kepemimpinan kepala daerah menggunakan Teori Modalitas yang umumnya dalam kajian Ilmu Pemerintahan Teori Modalitas digunakan untuk menilai peran modalitas dalam kemenangan calon kepala daerah dalam Pilkada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Metode penelitian kualitatif menurut Miles & Huberman (1984) merupakan bentuk penelitian yang sifatnya investigatif yang peneliti memaknai suatu

fenomena sosial dengan cara membandingkan, membedakan, menggandakan, serta mengklasifikasikan objek penelitian. Penelitian ini menggali kecenderungan modalitas yang dimiliki Gibran Rakabuming sebagai Walikota Surakarta dengan perkembangan Kota Surakarta pada masa kepemimpinannya yang dikomparasikan dengan perkembangan Kota Surakarta pada kepemimpinan Walikota Surakarta sebelumnya.

Pendekatan studi kasus adalah pendekatan penelitian untuk menjabarkan dan memahami objek yang diteliti terhadap suatu kasus yang dilakukan secara khusus. Pendekatan studi kasus juga menjawab masalah dari suatu fenomena sosial secara komprehensif atau menyeluruh. Pada penelitian ini diketahui bahwa terdapat beberapa modalitas yang dimiliki Gibran yang akhirnya dapat membawa dirinya menjadi Walikota Surakarta. Modalitas tersebut yang kemudian diteliti lebih lanjut untuk ditinjau kapasitas kepemimpinan Gibran sebagai Walikota Surakarta. Penelitian ini dilakukan di Kota Surakarta, Jawa Tengah.

Subjek penelitian ini adalah Gibran Rakabuming Raka sebagai Walikota Surakarta. Penelitian ini menggunakan teknik purposif dalam menentukan informan, yakni

berdasar kriteria orang-orang yang punya pengetahuan, terlibat langsung maupun tidak langsung tentang fokus penelitian ini. Berdasar pada kriteria ini, informan penelitian adalah:

1. Mantan Walikota Surakarta, F.X Hadi Rudytamo
2. Wakil Walikota Surakarta, Teguh Prakosa
3. Direktur Utama LSM KOMPIP Solo, Eko Setyawan
4. Presiden BEM UNS, Hilmy A. Shidiqi

Semula peneliti merencanakan Gibran Rakabuming selaku subjek penelitian menjadi sebagai informan kunci. Namun peneliti tidak berhasil mewawancarainya. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik *purposive* untuk menentukan informan lain yang memiliki pengetahuan tentang fokus penelitian ini.

Pada penelitian ini digunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang didapatkan dari pengamatan peneliti dan informasi dari para informan yang diambil. Data sekunder merupakan data pendukung yakni diperoleh dari sumber data yang relevan dengan fenomena sosial yang diteliti untuk mendukung atau memperkuat

data primer. Data sekunder pada penelitian ini adalah dokumentasi dan data publikasi.

Proses pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini menggunakan in-depth interview yakni proses pengumpulan data dengan wawancara mendalam dengan pedoman wawancara kepada informan yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan penelitian. Proses wawancara dan dokumentasi terus berlanjut hingga pengumpulan data telah mencakup berbagai perspektif yang memperkuat hipotesis penelitian.

Dalam mengolah data pada penelitian kualitatif ada tiga langkah analisis data menurut (Miles, M B; Huberman, A M; Jhonny, S, 2014) yakni, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan tahap mengolah data yang menajamkan, melakukan spesialisasi, mengarahkan, menghilangkan data yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian, melakukan pengorganisasian data supaya dapat dilakukan penarikan kesimpulan di akhir.

Kemudian penyajian data adalah bentuk analisis data yang menjabarkan informasi yang telah disusun dalam bentuk teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Penarikan kesimpulan adalah analisis

data yang dilakukan peneliti selama di lapangan. Analisis data menggunakan tiga langkah tersebut setelahnya dalam proses penyajian data dilakukan validitas data dari berbagai sumber yang telah didapatkan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu triangulasi sumber data adalah pendekatan yang digunakan untuk mengecek validitas data dari berbagai sumber seperti wawancara dan observasi hingga data yang berasal dari dokumen dan arsip dan *member checking* adalah strategi untuk melakukan validitas data yang bersumber dari informan.

HASIL PEMBAHASAN

Kuatnya modal sosial Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang bersumber dari dinasti politik Jokowi, dapat ditinjau sejak proses penjarangan dan pencalonan Walikota Surakarta di PDI-P hingga kepemimpinannya berjalan di Kota Surakarta. Bahkan diperkuat lagi dengan proses kenaikan Gibran sebagai Calon Wakil Presiden RI dari Prabowo Subianto yang merupakan oposisi dari partai pengusung Gibran di Pilwakot Surakarta tahun 2020 lalu yakni PDI-P. Peristiwa-peristiwa tersebut saling bersambung dan membentuk *puzzle* yang saling menghubungkan dan menjelaskan satu sama lain mengenai motif dinasti politik Joko Widodo.

Di mana Joko Widodo menerapkan *octopussy dynasties* untuk melanggengkan trah-nya sebagai pejabat publik yang dicintai rakyat. Dinasti yang dibangun Jokowi memberikan kemudahan bagi Gibran untuk mendapatkan legitimasi dan peningkatan elektabilitas sebagai tokoh publik yang dianggap masih baru. Dalam konteks ini peran Jokowi dalam membangun citra Gibran sebagai Walikota Surakarta sangat penting. Di mana Jokowi sebagai Presiden RI yang memiliki kewenangan dalam menyetujui Proyek Strategis Nasional sebagaimana yang disebutkan pada PP Nomor 42 Tahun 2021 Pasal 3 yaitu menteri melakukan evaluasi daftar PSN atas usulan yang telah diterima dari menteri/kepala lembaga/kepala daerah dan Badan Usaha, lalu berdasarkan hasil evaluasi menteri dilakukan fiksasi atau penetapan daftar PSN melalui persetujuan Presiden. Artinya Jokowi yang merupakan ayah kandung Gibran dan juga sebagai Presiden RI memiliki kewenangan dalam menyetujui Proyek Strategis Nasional. Dengan demikian tidak heran apabila Kota Surakarta banjir Proyek Strategis Nasional, karena terdapat *privilege* Gibran selaku Walikota Surakarta yang juga merupakan Putra Sulung Presiden Joko Widodo.

Kuatnya modal sosial Gibran juga dapat dilihat dari kilas balik ke peristiwa

proses pencalonan Gibran hingga pada proses kepemimpinannya sebagai kepala daerah sangat jelas adanya pengaruh dari modal sosial yang dimilikinya sebagai Putra Presiden RI Joko Widodo. Pada Pilkada 2020 DPC PDIP mengusung Achmad Purnomo dan Teguh Prakosa melalui penjangkaran internal partai secara tertutup. Selama momen Purnomo-Teguh menunggu rekomendasi dari DPP, Gibran berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai Walikota Surakarta dari PDI-P. Kemudian atas rekomendasi Megawati yang merupakan Ketua Umum PDI-P, Gibran mendaftar melalui DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Jawa Tengah. Di mana rekomendasi dari Ketua Umum PDI-P tersebut dilatarbelakangi oleh permintaan Jokowi. Hingga akhirnya Gibran berhasil menjadi Calon Walikota Surakarta yang diusung oleh PDI-P dengan Calon Wakil Walikota Surakarta yakni Teguh Prakosa. Berdasarkan fakta di atas sebenarnya pencalonan PDI-P dilakukan secara *bottom-up*, tetapi dalam konteks di atas terdapat intervensi presiden yang mempengaruhi independensi partai, sehingga pencalonan kandidat pada Pilwali Kota Surakarta 2020 pada partai PDI-P bersifat *top-down*. Di mana intervensi tersebut digunakan untuk melanggengkan dinasti politik Jokowi.

Selain ditinjau dari proses pencalonan Gibran sebagai Walikota Surakarta, beberapa hal yang menjadi indikasi kuatnya modal sosial Gibran pada kepemimpinannya adalah ia berhasil membanjiri Kota Surakarta dengan banyak *event-event* besar baik nasional maupun internasional seperti Side Event G20 (TIIWG, IWTCF G20, Post Summit Y20, dll), FIFA U-17 2023, dan ASEAN Para Games Solo 2022. Adapun beberapa *event* besar daerah yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Surakarta yakni Gebyar Pasar Rakyat Kota Solo, Serira (Atraksi Tempa Keris), *The Story of Centhini*, Solo Batik Fashion XV, Solo Is Solo (*Street Art Market*), International Mask Festival, SIPA (*Solo International Performing Arts*), dan Batik Solo Carnaval (Kompas, 2022).

Banyaknya *event* besar baik internasional maupun nasional yang diselenggarakan di Solo pada masa kepemimpinan Gibran ini merupakan salah satu bentuk kuatnya modalitas sosial Gibran. Terutama *event-event* nasional maupun internasional yang seringkali ditarik di Kota Surakarta pada kepemimpinan Gibran. Hal ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan pada kepemimpinan Rudyatmo di mana *event-event* besar tidak sebanyak dan seramai saat ini. Pembangunan infrastruktur juga

sangat masif pada kepemimpinan Gibran, yakni pada dua tahun kepemimpinan Gibran besar nilai proyek pusat yang diterima Kota Surakarta adalah sebanyak Rp 2 Triliun untuk 32 proyek. Besar nilai tersebut berbeda jauh dengan daerah di sekitarnya, seperti Cirebon yang besarnya Rp 171,3 Miliar, Malang sebesar Rp 165,2 Miliar, Madiun sebesar Rp 161,08 Miliar, dan Tasimalaya sebesar Rp 131,9 Miliar (KataData, 2023). Banjirnya proyek pusat yang masuk ke Kota Surakarta yang datang tanpa diminta merupakan bukti kuatnya peran relasi kekeluargaan Gibran dengan Joko Widodo sebagai Presiden RI.

Berdasarkan data di atas, artinya selain Gibran memiliki modal sosial yang kuat dalam membangun Kota Surakarta, ia juga memiliki strategi politik dalam rangka meningkatkan citranya untuk menaikkan tingkat elektabilitasnya sebagai tokoh publik. Gibran berhasil memanfaatkan modal sosial yang dimilikinya untuk membangun Kota Surakarta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Solo, yakni bangunan infrastruktur yang merupakan ruang publik di Kota Surakarta dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Surakarta sehingga dapat menjadi ruang untuk mensejahterakan masyarakat Kota Solo. Oleh karena itu, *output* yang dihasilkan dari kebijakan-kebijakan dan pengelolaan kota pada

kepemimpinan Gibran pada prinsipnya sangat menguntungkan masyarakat Kota Surakarta sehingga Gibran berhasil mendapatkan legitimasi dari publik terhadap kepemimpinannya sebagai Walikota Surakarta. Strategi Gibran dalam meningkatkan elektabilitasnya adalah dengan memanfaatkan *public interest* untuk mendapatkan legitimasi.

Dengan demikian, kasus banjirnya PSN di Kota Surakarta pada kepemimpinan Gibran merupakan bentuk praktik *pork barrel politics*. Di mana Gibran membawa kebijakan-kebijakan populis melalui relasinya dengan Jokowi sebagai Presiden RI sekaligus ayah kandungnya untuk meromantisasi hubungannya dengan rakyat supaya mendapatkan legitimasi untuk meningkatkan elektabilitasnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Proyek Strategis Nasional yang masuk ke Kota Surakarta pada kepemimpinan Gibran sebagai Walikota Surakarta. Eksistensi banyaknya PSN yang masuk ke Kota Surakarta pada kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka membuat kepercayaan publik meningkat karena menganggap Gibran merupakan kepala daerah dengan kerja nyata, sehingga tidak heran Gibran telah mendapatkan julukan sebagai “Walikota Top.”

Tingkat kepuasan masyarakat Kota Surakarta terhadap kepemimpinan Gibran juga cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan hasil survey UNISRI yang diambil dari 560 responden menyebutkan bahwa selama dua tahun kepemimpinan Gibran-Teguh mencapai 96 persen, dengan nilai skor 1.709, dan angka rata-rata IKM 3,057 atau kategori memuaskan. Di mana pada survey tersebut terdapat tujuh aspek aspirasi capaian kinerja positif Gibran-Teguh, antara lain; (1) kualitas pelayanan Pemerintah Kota Surakarta di tingkat kelurahan, kecamatan, dan balaikota; (2) pengelolaan isu keamanan; (3) pengaturan lalu lintas; (4) pengaturan pedagang kaki lima; (5) responsivitas Pemerintah Kota Surakarta; (6) keberpihakan Pemerintah Kota Surakarta pada keluarga pra-sejahtera; (7) serta keberpihakan Pemerintah Kota Surakarta dalam mendorong perekonomian melalui pembangunan infrastruktur dan penyelenggaraan event skala nasional atau internasional maupun lokal (Zamani & Dita, 2023). Berdasarkan capaian angka tersebut, artinya 96% warga Kota Surakarta puas dengan Pemerintah Kota Surakarta pada kepemimpinan Gibran. Dengan demikian Jokowi sangat berperan dalam upaya peningkatan elektabilitas dan legitimasi

publik terhadap kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka.

Octopussy Dynasty pada Joko Widodo semakin nampak jelas ketika menuju konstelasi politik Pemilu 2024, dibuktikan dengan peristiwa naiknya nama Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden dari Prabowo Subianto yang merupakan oposisi PDI-P. Praktik *octopussy dynasty* ini juga mulai terindikasi saat peristiwa kenaikan Kaesang yang merupakan Adik Kandung Gibran menjadi Ketua Umum PSI serta peristiwa Keputusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan usia di bawah 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden selama memiliki pengalaman sebagai Kepala Daerah yang tertuang pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Berdasarkan Keputusan MK tersebut Majelis Hakim MK yang diketuai oleh Anwar Usman yang merupakan adik ipar Presiden Jokowi nampak memberikan karpet merah kepada Gibran sebagai keponakannya untuk maju pada kontesatsi pemilu 2024. Peristiwa tersebut diindikasikan terdapat konflik kepentingan di baliknya, di mana terdapat kepentingan keluarga untuk melanggengkan trah Joko Widodo melalui tangan putranya Gibran Rakabuming Raka.

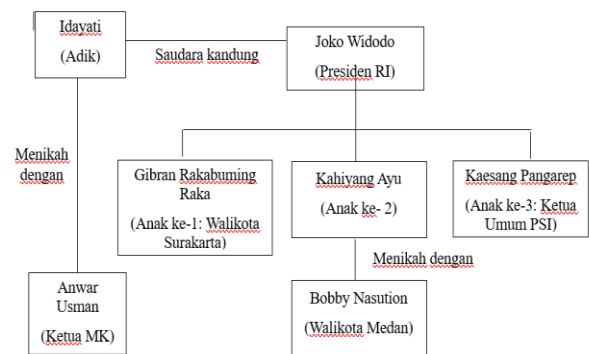
Runtutnya peristiwa mulai dari pencalonan Gibran sebagai Calon Walikota Surakarta yang diusung PDI-P dengan menjegal Achmad Purnomo, kemudian setelah Gibran menjabat sebagai Walikota Surakarta, Kota Solo banjir proyek pusat dan *event-event* besar baik nasional maupun internasional, lalu kemunculan nama Gibran di Partai Gerindra sebagai Calon Wakil Presiden dari Prabowo Subianto, kemudian diikuti peristiwa kenaikan Kaesang Adik Kandung Gibran sebagai Ketua Umum PSI, lalu munculnya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memperbolehkan Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden di bawah usia 40 tahun asal memiliki pengalaman sebagai Kepala Daerah. Kemudian secara resmi Gibran dicalonkan sebagai Cawapres dari Prabowo Subianto yang merupakan oposisi dari PDI-P yang merupakan Partai yang mengusung Gibran pada Pilwakot Surakarta 2020 lalu.

Peristiwa-peristiwa di atas merupakan peristiwa yang bersambung yang dapat dimaknai dan disimpulkan. Peristiwa-peristiwa tersebut menggambarkan bahwa Gibran merupakan tokoh yang sudah dipersiapkan untuk maju pada Pilpres 2024. Kemajuan Gibran sebagai Cawapres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 merupakan bentuk implikasi dari praktik

politik dinasti yang buruk. Peristiwa keputusan Anwar Usman Ketua MK sekaligus pamannya mengenai batas usia Capres dan Cawapres yang seolah-olah meloloskan Gibran, Putra Mahkota Joko Widodo untuk maju sebagai Cawapres Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024. Di mana peran Anwar Usman selaku Paman dari Gibran sekaligus Ketua MK merupakan modal sosial yang dimiliki Gibran untuk dapat naik menjadi Calon Wakil Presiden dari Prabowo Subianto pada Pemilu 2024 lalu.

Pada *case* ini Joko Widodo menerapkan politik dinasti yang bentuknya *vertical expansion*, yakni jaringan keluarga Joko Widodo berada di berbagai tingkat pemerintahan. Ini dapat dilihat dari posisi Joko Widodo sebagai Presiden RI, kemudian Gibran sebagai Putra Sulungnya adalah Walikota Surakarta, Bobby Nasution sebagai menantu Jokowi merupakan Walikota Medan, Anwar Usman sebagai Adik Ipar dari Jokowi yang menduduki kursi yudikatif sebagai Hakim Konstitusi dan Ketua MK ke-6, serta Kaesang yang merupakan Putra Bungsu Jokowi yang saat ini menjabat sebagai Ketua Partai PSI. Berdasarkan data tersebut artinya Joko Widodo menerapkan *vertical expansion* pada kekuasaannya, di mana relasi kekeluargaan tersebut dapat

berpotensi adanya praktik nepotisme dan politik kepentingan. Di mana relasi-relasi tersebut menjadi modal sosial yang dimiliki Gibran dalam meningkatkan elektabilitasnya sebagai tokoh publik.



Gambar 1. Bagan Dinasti Politik Joko Widodo

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa Joko Widodo menjadikan familisme sebagai preferensi politiknya. Pada dasarnya dinasti politik merupakan fenomena yang mencederai demokrasi, familisme dijadikan *tools* untuk melanggengkan kekuasaan seseorang untuk mempertahankan status sosialnya. Mengingat bahwa dinasti politik telah membatasi potensi demokrasi untuk berkembang dan memberikan peluang terbesar bagi kemajuan dalam politik, dinasti politik dapat dianggap memiliki antitesa dengan demokrasi. Pada kasus politik dinasti Jokowi dengan Gibran, terdapat sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya adalah dinasti politik Jokowi dengan Gibran sebagai

Walikota Surakarta ini memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Surakarta.

Hal ini dibuktikan berdasarkan data BPS tahun 2022 yang memperlihatkan pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta mencapai 6,25% dan berhasil menurunkan angka kemiskinan yakni berkurang 2,85 ribu jiwa pada tahun 2022 (BPS, 2023). Hal ini menggambarkan bahwa dua tahun Gibran memimpin dengan modal sosial yang dimilikinya ia berhasil membawa pertumbuhan perekonomian Kota Surakarta hingga 6,25%.

Sisi negatifnya adalah pada akhirnya tujuan dinasti politik adalah sama yakni melanggengkan kekuasaan untuk mempertahankan status sosialnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya fenomena kenaikan Gibran sebagai Cawapres di Pilpres 2024 melalui karpet merah dari keputusan MK yang saat itu Ketua Mahkamah Konstitusi adalah Anwar Usman yang merupakan Paman dari Gibran Rakabuming Raka. Kenaikan nama Gibran sebagai Cawapres juga menimbulkan polemik karena Gibran yang notabenehnya merupakan anggota PDI-P, kemudian dengan mudah berpindah haluan ke Partai Gerindra untuk mendampingi Prabowo Subianto sebagai Cawapres. Jika di kilas balik, prestasi dan

capaian yang diraih Gibran sebagai Walikota Surakarta merupakan bentuk *branding* untuk menaikkan elektabilitasnya sebelum dinaikkan sebagai Calon Wakil Presiden. Ini tujuannya adalah untuk menarik perhatian masyarakat terhadap Gibran dengan sebutan “Walikota Muda Top” karena berhasil mengembangkan Kota Surakarta dengan cukup signifikan. Dengan demikian eksistensi dinasti politik memiliki narasi yang sama yaitu untuk melanggengkan kekuasaan yang telah dibangun.

PENUTUP

Kesimpulan

Kapasitas kepemimpinan Gibran bergantung dengan modal sosial yang dimilikinya yakni berupa jaringan kekeluargaannya dengan Joko Widodo. Modal sosial ini menjadi modal yang erat dengan kepemimpinan Gibran sebagai Walikota Surakarta. Modal sosial yang dimiliki Gibran ini yang dimanfaatkannya untuk merangkul kepentingan publik (*public interest*), sehingga mampu membangun Kota Surakarta secara signifikan dalam masa kepemimpinan dua tahun sebagai Walikota Surakarta.

Modal sosial yang dimiliki Gibran tidak lepas dari familisme Jokowi di mana dinasti politik ternyata secara prinsip

kebijakan publik dapat menguntungkan masyarakat apabila *privilege* tersebut benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Namun, pada akhirnya dinasti politik Jokowi dengan Gibran memiliki skema yang sama dengan praktik-praktik dinasti politik pada umumnya, yakni berujung untuk melanggengkan kekuasaan. Hal ini terbukti ketika nama Gibran Rakabuming Raka naik menjadi Calon Wakil Presiden dari Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Saran

Saran yang dapat peneliti berikan secara praktis untuk mengatasi terjadinya praktik dinasti politik di berbagai lini yaitu; (1) melakukan reformasi hukum dengan memperkuat hukum dan konstitusi melalui batasan kekuasaan keluarga dalam politik; (2) memperkuat partai politik yang independen dan mendorong menggunakan sistem *bottom up* dalam pencalonan kandidat, serta melakukan pengawasan fungsi partai; (3) memperkuat advokasi untuk mengurangi praktik politik dinasti di ranah masyarakat sipil.

Saran dari peneliti secara sisi akademisi yakni perlu memperkuat kajian teoritis melalui penelitian lanjutan supaya hasil penelitian ini semakin valid dengan menambahkan informan kunci sebagaimana

pada subjek penelitian ini yakni Gibran Rakabuming Raka.

Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini memiliki kekurangan yakni tidak dapat menemui informan kunci yaitu Gibran Rakabuming Raka sebagai subyek penelitian. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini memiliki keterbatasan data sehingga perlu penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas. (2017). *Legitimasi dan Politik Kebijakan*. Depok: Alta Utama.
- Bappeda. (2020, Juni 22). *RKPD Kota Surakarta Tahun 2022*. Retrieved from PPID Kota Surakarta: <https://ppid.surakarta.go.id/informasi/dokumen-rencana-strategis-dan-rencana-kerja/>
- Bappeda Kota Surakarta. (2021). *RPJMD Kota Surakarta 2021-2026*. Retrieved 12 3, 2023, from Open Data Kota Surakarta: <https://data.surakarta.go.id/dataset/rpjmd-kota-surakarta-2021-2026>
- Bourdieu, P. (1995). *Outline of A Theory of Practice*. Cambridge: University of Cambridge.
- BPS Kota Surakarta. (2021). *Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Menurut Lapangan Usaha 2016-2020*. Surakarta: BPS Kota Surakarta.
- Buehler, M. (2013). *Married with the Children*.
- Buehler, M; Paige, T. (2007). Party-Candidate Relationships in Indonesian Local Politics: A Case Study of the 2005 Regional Elections in Gowa, South Sulawesi Province. *Indonesia*, 41-69.
- Djati. (2013). Revitalisasi Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, XVIII(2).
- Djati, W R. (2013). Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal. *Sosiologi Masyarakat*(18), 131-203.
- Granovetter, M. (1985). Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. *American Journal of Sociology*(91), 481-510.
- JPNN. (2021, Juli 1). *Wali Kota Gibran: Kami Kebut Terus*. Retrieved Desember 10, 2023, from [jpnn.com: https://www.jpnn.com/news/wali-kota-gibran-kami-kebut-terus#google_vignette](https://www.jpnn.com/news/wali-kota-gibran-kami-kebut-terus#google_vignette)
- Kartono, K. (2006). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- KataData. (2023, Oktober 30). *Cek Data: Benarkah Solo 'Diguyur' Proyek Pemerintah karena Gibran?* Retrieved Desember 14, 2023, from [katadata.co.id: https://katadata.co.id/cek-data/653eff6ab3941/cek-data-benarkah-solo-diguyur-proyek-pemerintah-karena-gibran](https://katadata.co.id)
- Kenawas, Y C. (2023). 25 Tahun Demokrasi Indonesia. *Tubagus Lima Korporat* (pp. 1-329). Bandung: PT Tubagus Lima Korporat.
- Kompas. (2019, Desember 23). *PDI-P Syaratkan Jadi Kader 3 Tahun untuk Maju Pilkada, Bagaimana Nasib Gibran?* Retrieved Desember 10, 2023, from [Kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2019/12/23/15424671/pdi-p-syaratkan-jadi-kader-3-tahun-untuk-maju-pilkada-bagaimana-nasib-gibran](https://nasional.kompas.com/read/2019/12/23/15424671/pdi-p-syaratkan-jadi-kader-3-tahun-untuk-maju-pilkada-bagaimana-nasib-gibran)
- Lacroix, J; Pierre, G M; Kim, O. (2019). A Positive Effect Of Political Dynasties. *Centre For Economic Policy Research*, 62.
- LKPP. (2024). *LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*. Retrieved from [lpse.pu.go.id: https://lpse.pu.go.id/eproc4/](https://lpse.pu.go.id/eproc4/)

- LKPP. (2024). *LPSE Kementerian Perhubungan*. Retrieved from lpse.dephub.go.id: <https://lpse.dephub.go.id/eproc4>
- Managan, K. (2015). One Hand Washes The Other: Social Capital and The Politics of Leisure in Guadeloupean Associations. *French Politics, Culture, & Society*, XXXIII(3), 75-156.
- Miles, M B; Huberman, A M; Jhonny, S. (2014). *Qualitative Data Analysis* (3rd ed.). London: SAGE.
- Palenewen, J D O. (2014). *Penerapan Patronase dalam Kemenangan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia pada Pemilu Legislatif Kota Balitung 2009*. Yogyakarta: Tesis Magister Universitas Gajah Mada.
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional
- PPID. (2023). *RKPD Kota Surakarta*. Retrieved Desember 10, 2023, from Diskominfo SP: <https://ppid.surakarta.go.id/informasi/nama-program-dan-kegiatan/>
- Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023
- Ridwan, M A; Fatkhuri. (2023). Dinamika Personalisasi Partai Politik Dalam Rekrutmen Bakal Calon Walikota Solo 2020 (Studi Kasus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, V(1), 1-16.
- Saragintan, A., & Syahrul, H. (2016). Politik Pork Barrel di Indonesia: Kasus Hibah dan Bantuan Sosial di Provinsi Banten Tahun 2011. *Jurnal Politik*, II(1), 138-164.
- Sholihatin. (2012). Jejaring Pemerintahan di Indonesia: Kekuatan dan Kelemahan. *Jejaring Administrasi Publik*, IV(1), 29-35.
- Smith, K. (2011). Pork Barrel Politics: Motives and Benefits. *The Journal of Political Research*, II, 1028.
- Stokes, S; et al. (2013). *Brokers, Voters, and Clientelism: The Puzzle of Distributive Politics*. New York: Cambridge University Press.
- Wahjosumidjo. (2002). *Kepemimpinan: Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Walker. (2010). Pork Barrel Spending: Is It Unethical? *Gatton Student Research Publication*, II(2).
- Wilk, Eric M. (2010). *Ideology and Distributive Benefits: Ideological and District Influences on The Distribution of Federal Spending*. New York: Disertasi University at Buffalo.
- Zakie, M. (2023). Tarik Ulur Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Penataan Ruang Proyek Strategis Nasional. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (pp. 111-116). Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.